

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM KERANGKA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018–2023

Siti Fatimatul Akhmaliyah¹, Cammila Amara Caesar², Eva Hany Fanida³, Melda Fadiyah Hidayat⁴

25040674395@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674365@mhs.unesa.ac.id², evafanida@unesa.ac.id³, meldahidayat@unesa.ac.id⁴

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang selama periode 2018–2023, sebuah kurun waktu krusial yang mencakup fase sebelum, saat, dan pasca-pandemi COVID-19, serta masa transisi regulasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan melakukan analisis rasio terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah diaudit. Rasio yang digunakan meliputi rasio kemandirian, efektivitas PAD, efisiensi belanja, desentralisasi fiskal, dan rasio keserasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dengan pola hubungan konsultatif. Meskipun terdapat tekanan ekonomi akibat pandemi pada 2020-2021, kinerja keuangan tetap terjaga pada kategori efektif, didorong oleh resiliensi sektor pajak daerah. Pengelolaan belanja juga telah memenuhi prinsip Value for Money, meskipun terdapat dominasi belanja operasi dibandingkan belanja modal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan digitalisasi pajak menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Kemandirian Fiskal, Kota Semarang, COVID-19, Value for Money.

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial performance of the Semarang City Government during the 2018–2023 period, a crucial timeframe covering the pre, during, and post-COVID19 pandemic phases, as well as the transition of Law No. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (HKPD). The research method used is descriptive quantitative by performing ratio analysis on the audited Budget Realization Reports (LRA). The ratios used include the independence ratio, PAD effectiveness ratio, spending efficiency ratio, fiscal decentralization ratio, and harmony ratio. The results show that the Semarang City Government has a high level of fiscal independence with a consultative relationship pattern. Despite economic pressure due to the pandemic in 2020-2021, financial performance remained in the effective category, driven by the resilience of the local tax sector. Expenditure management also met the Value for Money principle, although there was a dominance of operating expenditure over capital expenditure. This study concludes that strengthening the Internal Control System (SPI) and tax digitalization are key factors in maintaining regional fiscal stability.

Keywords: Financial Performance, Fiscal Independence, Semarang City, COVID-19, Value for Money.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Seiring dengan diterbitkannya regulasi terbaru mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), daerah dituntut untuk memiliki kemandirian fiskal yang lebih kuat serta transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Kota Semarang, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, menjadi fokus menarik karena posisinya sebagai pusat

pertumbuhan ekonomi regional yang memiliki ketergantungan unik terhadap dana transfer pusat sekaligus potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar.

Selama periode 2018–2023, Indonesia mengalami fluktuasi ekonomi yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Hal ini berdampak langsung pada postur APBD, di mana terjadi pergeseran prioritas anggaran dan perubahan pola pendapatan. Kinerja keuangan daerah tidak lagi hanya diukur dari sekadar penyerapan anggaran, tetapi lebih kepada sejauh mana rasio-rasio keuangan menunjukkan resiliensi dan efektivitas dalam pencapaian target pembangunan daerah di bawah kerangka hubungan keuangan pusat-daerah.

Masalah utama yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana profil kinerja keuangan Kota Semarang jika dianalisis melalui berbagai rasio keuangan seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan keserasian. Selain itu, faktor eksternal seperti regulasi pusat dan kondisi makroekonomi turut dipertimbangkan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kesehatan fiskal daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber daya keuangan dalam rangka mendanai kegiatan pemerintahan tanpa bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Menurut literatur (Karina & Wibowo, 2022), analisis kinerja keuangan sangat penting sebagai basis pengambilan keputusan dan evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Analisis Rasio Keuangan Daerah

Berdasarkan berbagai studi yang telah dilakukan di wilayah Semarang, terdapat beberapa instrumen rasio yang umum digunakan:

- Rasio Kemandirian Keuangan: Mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (Kurniawati, 2021). Studi menunjukkan Kota Semarang berada pada kategori "Kemampuan Tinggi" dengan pola hubungan konsultatif.
- Rasio Efektivitas PAD: Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Temuan menunjukkan bahwa meski di masa pandemi, efektivitas PAD Kota Semarang tetap berada pada kategori cukup efektif.
- Rasio Efisiensi Keuangan: Rasio ini melihat perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan itu sendiri. Beberapa penelitian (Lestari et al., 2020) menekankan bahwa efisiensi adalah kunci dalam menjaga stabilitas fiskal desa maupun kota.
- Rasio Desentralisasi Fiskal: Menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Rasio ini mencerminkan sejauh mana wewenang fiskal diberikan pusat kepada daerah (Hanik & Karyanti, 2014).

Kerangka Value for Money

Pendekatan Value for Money (VfM) menekankan pada tiga pilar utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam konteks Kota Semarang (Aulia & Nugraheni, 2022), penerapan VfM dengan pendekatan efektivitas menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil mencapai target-target kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 2017–2021 dengan rata-rata capaian 97,82%.

Faktor Pendukung Kualitas Laporan Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan yang baik harus didukung oleh kualitas laporan keuangan yang andal. Suhardjo (2019) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian

Intern (SPI) memiliki pengaruh paling signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Semarang, melampaui faktor kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi (SAKD).

Perbandingan Regional: Efektivitas Belanja

Sebagai pembanding, pengelolaan belanja daerah di wilayah metropolitan lain seperti Surabaya (Aisy et al., 2023) juga menunjukkan tren serupa di mana efektivitas dan efisiensi belanja daerah menjadi indikator utama keberhasilan pengelolaan APBD tahun 2023 dalam mendukung pelayanan publik.

HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan tinjauan pustaka dan sintesis dari berbagai hasil penelitian terdahulu di Pemerintah Kota Semarang, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai tabel berikut:

HIPOTESIS	PERNYATAAN
H1	Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Semarang pada periode 2018–2023 diprediksi berada pada tingkat kemandirian tinggi dengan pola hubungan fiskal yang bersifat konsultatif, meskipun mengalami fluktuasi selama masa pandemi.
H2	Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kota Semarang diprediksi mencapai kriteria "Efektif" (di atas 90%), menunjukkan kemampuan daerah yang kuat dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah.
H3	Terdapat pengaruh signifikan antara dinamika hubungan keuangan pusatdaerah (melalui Dana Transfer) terhadap tingkat efisiensi belanja daerah Pemerintah Kota Semarang.
H4	Penerapan Standar Pengendalian Intern (SPI) dan kualitas sumber daya manusia diprediksi secara simultan memperkuat transparansi kinerja keuangan daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Sumber: LRA Kota Semarang, diolah oleh penulis (2026)

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran sistematis dan faktual mengenai kinerja keuangan melalui perhitungan rasio-rasio keuangan daerah serta menganalisis tren kinerja selama rentang waktu enam tahun (2018–2023).

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018–2023.
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kota Semarang.

Data diperoleh dari situs resmi Pemerintah Kota Semarang, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta publikasi Kementerian Keuangan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode penelitian (2018–2023).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa rumus rasio keuangan daerah sebagai tabel berikut:

RASIO KEUANGAN	INDIKATOR PENGUKURAN
Rasio Kemandirian	$(\text{Realisasi PAD} / \text{Total Dana Transfer Pusat \& Provinsi} + \text{Pinjaman}) \times 100\%$
Rasio Efektivitas PAD	$(\text{Realisasi PAD} / \text{Target PAD}) \times 100\%$
Rasio Efisiensi	$(\text{Realisasi Belanja} / \text{Realisasi Pendapatan}) \times 100\%$
Rasio Desentralisasi Fiskal	$(\text{Total PAD} / \text{Total Pendapatan Daerah}) \times 100\%$
Rasio Keserasian	Analisis proporsi Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah

Sumber: PPID Kota Semarang (data diolah oleh penulis, 2026)

Tahapan Analisis

- Pengumpulan Data: Mengunduh dan mencatat angka realisasi APBD dari LRA.
- Perhitungan: Menghitung nilai masing-masing rasio untuk setiap tahun anggaran.
- Interpretasi: Mengklasifikasikan hasil rasio berdasarkan standar kriteria kinerja (Sangat Efektif, Efektif, Cukup Efektif, atau Tidak Efektif).
- Analisis Tren: Membandingkan kinerja antar tahun, khususnya membedah dampak sebelum, saat, dan sesudah pandemi COVID-19.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis lebih mendalam, data yang digunakan dalam penelitian ini melalui serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan model analisis memenuhi kaidah statistik yang berlaku, terutama pada variabel yang bersifat pengaruh (seperti pengaruh SPI terhadap kualitas laporan):

- Uji Normalitas: Digunakan untuk menguji apakah data terdistribusi secara normal. Berdasarkan data LRA Kota Semarang 2018–2023, sebaran data realisasi pendapatan dan belanja menunjukkan pola yang konsisten dan layak untuk dianalisis secara kuantitatif.
- Uji Multikolinearitas: Memastikan tidak adanya korelasi linear yang kuat antar variabel independen. Dalam konteks ini, variabel PAD dan Dana Transfer diuji untuk melihat independensi keduanya dalam mempengaruhi kinerja daerah.
- Uji Heteroskedastisitas: Digunakan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.
- Uji Autokorelasi: Menguji korelasi antar data dalam rangkaian waktu (time series) dari tahun 2018 hingga 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kemandirian dan Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan temuan data periode 2018–2023, Pemerintah Kota Semarang menunjukkan Rasio Kemandirian yang berada pada kategori "Kemampuan Tinggi". Hal ini didorong oleh kontribusi PAD yang signifikan, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi. Pola hubungan yang terbentuk adalah hubungan konsultatif, di mana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena daerah dianggap lebih mampu membiayai otonominya.

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja Keuangan

Penelitian menunjukkan adanya fluktuasi pada tahun 2020–2021. Meskipun terjadi penurunan realisasi pendapatan di beberapa sektor akibat pembatasan aktivitas masyarakat, Rasio Efektivitas PAD tetap terjaga di kategori "Cukup Efektif". Hal ini membuktikan bahwa basis ekonomi Kota Semarang memiliki resiliensi yang baik terhadap guncangan eksternal dibandingkan wilayah penyangga lainnya.

Efisiensi dan Value for Money

Dari sisi belanja, realisasi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik. Menggunakan pendekatan Value for Money, Pemerintah Kota Semarang berhasil merealisasikan program-program strategis dengan penyerapan anggaran yang optimal. Namun, rasio efisiensi yang kadang melebihi 100% pada tahun tertentu (seperti pada 2020) mengindikasikan adanya penggunaan cadangan kas atau SILPA tahun sebelumnya untuk menutupi kebutuhan mendesak penanganan kesehatan.

Peran Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Selaras dengan studi Suhardjo (2019), pembahasan ini mengonfirmasi bahwa transparansi kinerja keuangan Kota Semarang selama 2018–2023 sangat bergantung pada efektivitas SPI. SPI yang kuat memastikan bahwa meskipun terjadi pergeseran anggaran (refocusing) di masa darurat, pencatatan dan pelaporan keuangan tetap akurat dan memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Dalam kerangka HKPD, ketergantungan pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih ada, namun porsinya mulai seimbang dengan pertumbuhan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang sedang bergerak menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan sesuai dengan amanat regulasi terbaru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2018–2023 dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kemandirian Fiskal: Pemerintah Kota Semarang menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi dengan pola hubungan konsultatif. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Semarang telah mampu membiayai sebagian besar urusan rumah tangganya melalui PAD, meskipun dinamika transfer pusat tetap menjadi faktor pendukung stabilitas.
2. Efektivitas Pendapatan: Realisasi pendapatan asli daerah secara konsisten mencapai kategori efektif. Ketangguhan ini terlihat bahkan pada masa pandemi COVID-19, di mana pemerintah daerah mampu melakukan adaptasi fiskal yang cepat untuk menjaga ketersediaan anggaran.
3. Efisiensi dan Value for Money: Pengelolaan belanja daerah dinilai efisien dalam mendukung program-program prioritas. Penerapan prinsip Value for Money memastikan bahwa setiap pengeluaran diarahkan pada pencapaian target kinerja yang memberikan manfaat langsung bagi pelayanan publik.
4. Kualitas Pelaporan: Keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) didukung kuat oleh Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif, yang menjamin transparansi dan akuntabilitas meskipun di tengah tantangan perubahan regulasi hubungan keuangan pusat-daerah.

Saran

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Ekspansi Basis Pajak Digital: Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (etax) untuk meminimalkan kebocoran pendapatan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah—mencakup pajak hotel, restoran, dan parkir.
2. Penyelarasan dengan UU HKPD: Melakukan sinkronisasi kebijakan anggaran secara berkelanjutan dengan regulasi terbaru mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk memastikan kepatuhan alokasi

- belanja wajib (mandatory spending).
3. Penguatan Belanja Modal Produktif: Menyeimbangkan proporsi belanja operasi dengan terus meningkatkan alokasi belanja modal pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
 4. Peningkatan Kapasitas SDM Akuntansi: Mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pengelola keuangan terkait sistem akuntansi berbasis akrual agar kualitas laporan keuangan tetap terjaga di tengah perkembangan standar akuntansi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, P. (2014). Analisis kinerja keuangan untuk mengukur kesehatan keuangan Koperasi KSU BMT Arafah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. *Jurnal Among Makarti*, 7(1).
- Aisy, S. R., Prameswari, N. R. A., Fanida, E. H., & Fitri, R. A. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi belanja daerah dalam APBD Pemerintah Kota Surabaya 2023. *Japs: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 1(1).
- Aulia, E. N., & Nugraheni, A. P. (2022). Analisis Value for Money dengan pendekatan efektivitas pada kinerja keuangan Kota Semarang pada tahun anggaran 2017–2021. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, 2(6), 413–420. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.282>
- Hanik, F. U., & Karyanti, T. D. (2014). Analisis rasio keuangan daerah sebagai penilaian kinerja (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang). *JABPI: Jurnal Administrasi Bisnis dan Politeknik Indonesia*, 22(2).
- Karina, N. N., & Wibowo, P. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Semarang sebelum dan saat pandemi Covid-19. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 14(2), 146–166. <https://doi.org/10.35335/ekspansi.v14i2.289>
- Kumala, N. S., & Widyarti, M. H. (2020). Pengaruh penerapan Total Quality Management terhadap kinerja keuangan dengan sistem pengukuran kinerja sebagai variabel moderasi pada CV Mutiara Abadi Semarang. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 3(1). <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v3i1.1966>
- Kurniawati, E. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah [Ringkasan Skripsi]. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Lestari, D. D. A., Pertiwi, I. B., Muchlisun, M., Kabib, N., & Anwar, S. (2020). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang tahun 2017–2018. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(9).
- Nathania, A. R., & Hardiyanti, W. (2024). Financial performance of Semarang City KONI in fiscal year 2018–2023. *Jurnal Ekonomi*, 13(02). <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i02>
- Suhardjo, Y. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi kasus Pemerintah Kota Semarang). *Makalah Ilmiah Solusi*, 17(4).